

## **GERAKAN MELAWAN HUKUM MONARKI DI THAILAND**

### *MOVEMENT AGAINST MONARCHICAL LAW IN THAILAND*

**Nagari Yanottami<sup>1</sup>, Dedik Fitra Suhermanto<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Department of International Relations, University of Muhammadiyah Malang  
Jalan Raya Tlogomas No.246 Tlogomas, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding author: <sup>1</sup> nagariyanott28@webmail.umm.ac.id*

**Abstrak** – Suasana politik Bangkok, Thailand ramai diperbincangkan dan sedang menjadi pusat berbagai media internasional. Thailand menempatkan monarki sebagai sebuah kedudukan yang dapat dikatakan sangat diperlukan diantara kehidupan rakyat. Ketentuan hukum *Lèse-Majesté* dipergunakan bagi para rezim yang berkuasa untuk mengendalikan kebebasan berpendapat. Penindasan luas terhadap kebebasan berbicara secara *online* memberikan kesempatan untuk mengekang kritik terhadap oposisi, tetapi juga dapat merusak kredibilitas undang-undang monarki otoriter Thailand. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gerakan melawan hukum monarki di Thailand yang dilakukan oleh *Future Forward Party* (FFP). Landasan konseptual yang digunakan ialah tentang gerakan sosial dengan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap literatur ilmiah. Hasil penelitian menjelaskan *Future Forward Party* (FFP) merupakan sebuah partai pro-demokrasi yang menentang hukum *Lèse-Majesté* di Thailand ini. Gerakan partai ini kemudian diikuti oleh gerangan mahasiswa dan masyarakat dalam demonstrasi besar besaran yang memiliki tujuan mengakhiri sebuah kekuasaan pemerintahan serta membatasi kekuasaan seorang raja. Makin banyaknya remaja mengikuti aksi ini menjadi hal yang paling menonjol dalam gerakan pro-demokrasi.

**Kata Kunci:** Demonstrasi; Gerakan Sosial; Monarki; Thailand

**Abstract** – *The political situation in Bangkok, Thailand is widely discussed and is currently the center for various international media. Thailand places the monarchy as a position that can be said to be indispensable among people's lives. The provisions of the Lèse-Majesté law are used for regimes in power to control freedom of expression. A widespread crackdown on free speech online provides an opportunity to curb criticism of the opposition but can also undermine the credibility of Thailand's authoritarian monarchy laws. This study aims to describe the movement against monarchical law in Thailand carried out by the Future Forward Party (FFP). The conceptual foundation used is about social movements with the qualitative descriptive research methods through the literature studies on scientific literature. The results of the research explain that the Future Forward Party (FFP) is a the pro-democratic party that opposes the Lèse-Majesté law in Thailand. The party's movement was then followed by student and community movements in large-scale demonstrations aimed at ending a government power and limiting the power of a king. The increasing number of teenagers participating in this action became the most prominent thing in the pro-democracy movement.*

**Keywords:** *Demonstration; Social movements; Monarchy; Thailand*

### **PENDAHULUAN**

Kebebasan untuk berpendapat serta berekspresi merupakan hak fundamental yang memiliki dimensi personal dan sosial. Hal itu dianggap sebagai kondisi yang paling dibutuhkan sebagai pengembangan penuh pribadi serta penting menjadi perihai utama untuk setiap masyarakat bebas dan demokratis. Semua bentuk komunikasi dilindungi, termasuk wacana politik, komentar tentang diri sendiri dan urusan publik, kampanye,

diskusi mengenai HAM, jurnalisme, ekspresi budaya dan seni, pengajaran dan wacana agama (Shader et al., 2021).

Di bawah ICCPR atau *International Covenant on Civil and Political Rights*, cakupan kebebasan berekspresi meliputi kebebasan mencari, menerima serta menyebarkan informasi dan ide dari segala jenis, tanpa memandang batas negara secara lisan, tertulis maupun cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain apa pun termasuk dalam

melindungi ekspresi dalam semua bentuk, seperti lisan, tulisan, bahasa isyarat, dan ekspresi non-verbal lewat sebuah karya seni. Tanpa kebebasan berbicara, penikmatan hak-hak lain tidak mungkin dilakukan. Misalnya, kebebasan berbicara, bersama dengan kebebasan berkumpul dan berserikat, diperlukan untuk pelaksanaan hak memilih secara efektif. Hak untuk memilih dikompromikan dalam masyarakat yang tidak memiliki pertukaran ide dan informasi yang bebas tentang masalah publik dan politik antara warga negara, kandidat, dan perwakilan terpilih. Namun, dalam hal ini kebebasan dalam berekspresi bukanlah hak mutlak serta masih bisa dibatasi jika diperlukan dan juga dilakukan secara adil. Di bawah ICCPR, kebebasan berekspresi ini hanya bisa dibatasi oleh hukum dan jika diperlukan kebebasan berekspresi digunakan untuk menghormati hak atau identitas seseorang; atau sebagai perlindungan keamanan nasional serta ketertiban umum, ataupun kesehatan serta moral masyarakat (Howie, 2018).

Berdasarkan hal tersebut, undang-undang atas pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dapat dibenarkan karena melindungi reputasi atau identitas serta hak orang lain selama tidak melewati batas. Namun, undang-undang, misalnya, yang membatasi penyelidikan dari pintu ke pintu dalam pemilu atau kegiatan seperti memblokir akses ke sumber media cenderung melanggar kebebasan. Terakhir, kebebasan berekspresi memainkan peran penting dalam menegakkan hak asasi manusia lainnya. Transparansi dan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia ditingkatkan dengan kebebasan berekspresi, menjadikannya prasyarat penting untuk memastikan perlindungan hak yang tepat.

Pembelaan kebebasan berekspresi dan hak-hak demokrasi lainnya sangat terkait dengan demokrasi barat, sebagai warisan era Perang Dingin. Sementara, Blok Soviet sebagian besar mempromosikan perjanjian yang melindungi hak-hak ekonomi serta sosial (seperti hak atas perumahan, pendidikan, dan kesehatan), Barat memprioritaskan hak-hak sipil serta politik (seperti kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan publik). Namun, kebebasan berekspresi saat ini sedang diserang di seluruh dunia. Pada bulan Oktober 2016, pakar kebebasan berekspresi PBB melaporkan bahwa individu yang ingin menggunakan hak mereka untuk berekspresi menghadapi semua jenis batasan yang diberlakukan oleh pemerintah yang tidak legal, perlu, atau proporsional dengan

mencatat bahwa target pembatasan termasuk jurnalis dan blogger, kritikus pemerintah, pembangkang dari kehidupan konvensional, provokator dan segala macam minoritas. Undang-undang dan kebijakan baru-baru ini menunjukkan bahwa demokrasi barat tidak kebal dari tren ini, dengan pemerintah semakin bersedia membatasi kebebasan masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam debat dan diskusi publik (Howie, 2018). Dua contoh menggambarkan tren ini adalah munculnya undang-undang anti-protes dan pengawasan pemerintah atas metadata telekomunikasi warga.

Seperti belakangan ini, suasana politik Bangkok, Thailand ramai diperbincangkan dan sedang menjadi pusat berbagai media internasional. Beberapa kegiatan yang ramai disorot termasuk warga negara Thailand yang melakukan tindakan aksi demonstrasi besar-besaran. Warga negara yang pro-demokrasi melakukan tindakan tersebut demi untuk mencapai tujuannya yaitu keadilan. Mereka melakukan tindakan aksinya untuk menuntut perubahan konstitusi, reformasi monarki, dan pengunduran diri perdana menteri. Tindakan aksi yang dilakukan oleh warga negara yang mayoritas kaum muda ini dilakukan dikarenakan perasaan kecewa mereka akan pemerintah. Perasaan kecewa tersebut ditujukan kepada pemerintahan militer yang mana dianggap tidak menunjukkan adanya suatu kemajuan dalam pemerintahan dan telah menutup adanya demokrasi.

Thailand menempatkan monarki sebagai sebuah kedudukan yang dapat dikatakan sangat diperlukan di antara kehidupan rakyat. Raja Thailand, yaitu Raja Bhumibol Adulyadej sangat terhormat dan kerap diberi penuh cinta oleh publik juga diperlakukan seperti layaknya seorang dewa di Thailand (Saju, n.d.). Untuk itulah, di Thailand kekuasaan raja sangat berpengaruh cukup besar. Thailand mempunyai hukum yang dinamakan hukum *Lèse-Majesté* yang diberlakukan untuk melindungi raja dan melarang segala bentuk penghinaan pada monarki. Hukum ini merupakan hukum yang sangat ketat tidak hanya di Thailand melainkan juga di dunia. Hukum ini diterapkan sebagai hukum yang mana jika siapapun yang melanggar dan dinyatakan bersalah akan dihadapkan dengan hukuman 15 tahun penjara (Hidriyah, 2020).

Ketentuan hukum *Lèse-Majesté* ini dipergunakan bagi para pemerintah yang berkuasa untuk mengendalikan kebebasan mengutarakan pendapat. Setelah wafatnya Raja Bhumibol Adulyadej, para warga negara yang melakukan

tindakan aksi demonstrasi dan gerakan reformasi monarki menginginkan adanya pembatasan akan kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn. Para demonstran menginginkan untuk menuntut pencemaran nama baik kerajaan dihapuskan dari undang-undang, mereka juga meminta agar raja tidak terlibat dalam segala bentuk kegiatan politik yang terjadi. Para aktivis meminta agar adanya adaptasi yang terjadi diantara monarki dan zaman modern.

Dalam sebuah buku yang ditulis oleh S Preechasilpakul dan David Streckfuss, *Ramification and re-sacralization of the lèse majesté law in Thailand*, menunjukkan bagaimana pengadilan yang lebih luas mencoba mengidentifikasi mereka yang dicurigai memfitnah negara, monarki, atau niat orang Thailand, menjadikan logika citra diri rezim itu jelas. Dalam menekankan momen-momen hukum tersebut, Streckfuss menjelaskan logika kolektif dari konsolidasi kekuasaan di Thailand (Preechasilpakul & Streckfuss, 2008).

Hal inilah yang menunjukkan bahwa hukum *Lèse-Majesté* memberikan ruang bagi rezim untuk mencurigai serta memberikan sanksi kepada masyarakat yang mencoba untuk memberi kritikan terhadap rezim kekuasaan. Secara khusus, penelitian dari Streckfuss dan Preechasilpakul mengenai hukum *Lèse-Majesté* pada tahun 2008 dengan melihat latar belakang dari beberapa kasus. Namun, dalam hal memberikan kritikan terhadap hukum *Lèse-Majesté* ini juga terdapat gerakan yang membuat partisipasi masyarakat semakin tinggi untuk menanggapi hukum *Lèse-Majesté* ini. Bagian ini belum terlihat pada penelitian sebelumnya, sehingga dianggap penting untuk dibahas dalam sebuah karya ilmiah.

Selanjutnya, menurut J Sombatpoonsiri dalam penelitiannya yang berjudul *Growing Cyber Activism in Thailand* menjelaskan bahwa sejak kudeta militer pada tahun 2014, rezim otoriter Thailand telah memperkuat kontrolnya atas dunia maya, meningkatkan kontrolnya atas internet serta perbedaan pendapat *online*. Dalam seminggu setelah kudeta, rezim memblokir akses ke ratusan situs web. Di saat yang sama, penguatan kontrol internet telah meningkatkan tuduhan penistaan agama terhadap kritikus, pembangkang, dan warga negara biasa. Untuk perilaku non-kriminal di media sosial (seperti hanya “like” atau berbagi posting Facebook atau pesan obrolan yang ditafsirkan sebagai kritik terhadap monarki), hukuman penjara karena dakwaan *Lèse-Majesté* menjadi lebih parah (Sombatpoonsiri, 2018). Berdasarkan apa yang

dijelaskan oleh Sombatpoonsiri, peneliti melihat bahwa rezim semakin memperkuat kontrolnya terhadap internet hal ini membuat terbatasnya akses untuk menyalurkan suara dari rakyat kepada rezim Thailand.

Selain itu, hal ini bisa dilihat dari pendapat L. Nudelman dalam penelitiannya yang berjudul *Beyond Common Sense: the Resurgence of Thailand's Anachronistic Lèse Majesté Law* mengenai undang-undang *Lèse Majesté* yang sudah kadaluwarsa. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kasus hukuman *Lèse-Majesté* dalam dekade terakhir bukanlah kebetulan, tetapi digunakan sebagai alat politik. Dengan kata lain, hukum telah menjadi senjata pamungkas untuk menekan kritik militer dan klaim korup, sekaligus meningkatkan legitimasi militer negara (Nudelman, 2018).

Kemudian, Tim Yu dalam tulisannya yang berjudul *Thailand's Struggle for Freedom of Expression in Cyberspace* menjelaskan bahwa hak atas kebebasan berbicara umumnya dianggap sebagai ukuran dasar dari setiap kebebasan dan demokrasi. Thailand selalu menghadapi tantangan untuk memberikan kebebasan berbicara sekaligus melindungi monarki konstitusionalnya dari pencemaran nama baik. Namun, setelah kudeta militer di Thailand pada tahun 2006, Bangkok semakin mengadopsi undang-undang *Lèse-Majesté* sebagai senjata untuk melawan oposisi politik dan menekan diskusi politik bebas di Thailand. Meskipun dakwaan undang-undang *Lèse-Majesté* dan tuduhan CCA menyebar serta membungkam oposisi untuk sementara, penyalahgunaan kekuasaan yang sering terjadi menurut Tim Yu telah menimbulkan kekhawatiran serius tentang kebebasan berbicara dan berkomunikasi di Thailand di masa depan (Yu, 2013).

Selain itu, menurut Thongchai Winichakul di dalam tulisan *Confessions to Lèse Majesty: A Lens into the Rule of Law in Thailand*, negara Hukum di Thailand memiliki karakteristik tersendiri karena sejarah dan perkembangannya yang khas. Ini telah memburuk selama krisis politik selama 10-15 tahun terakhir dakwaan *Lèse-Majesté* meroket, terutama sebagai konsekuensi dari dua kudeta militer pada tahun 2006 dan 2014. Tidak seperti kejahatan lainnya, kebanyakan orang yang ditangkap karena *lèse majesté* mengakui kejahatan itu (Winichakul, 2019).

Dalam hal ini, menurut David Streckfuss dalam jurnalnya yang berjudul *Kings in the Age of Nations: The Paradox of Lèse-Majesté as*

*Political Crime in Thailand*, penggunaan hukum *Lèse-Majesté* tidak terkendali serta tidak kondusif untuk monarki. Undang-undang selalu membatasi kebebasan berbicara, tetapi setidaknya di tahun 1990-an dan awal 2000-an, kasus seperti itu jarang terjadi, dan aturan “kaisar besar” membuat pemilihan seperti itu tidak mungkin dilakukan. Di dalam *Lèse-Majesté* disebutkan bahwa hukum melindungi raja, ratu, ahli waris, dan bupati, tetapi sebenarnya tampaknya hanya melindungi anggota keluarga kerajaan lainnya. Menurut David Streckfuss, hukum tersebut tidak jelas, dan pengadilan telah menafsirkannya secara ekstensif. Namun, yang paling berbahaya dari *Lèse-Majesté* ini adalah hukuman berat dan jumlah kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya (Streckfuss, 1995).

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, dapat dilihat bahwa hukum *Lèse Majesté* ini mendapatkan banyak sekali pertentangan. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan peneliti fokuskan pada Gerakan Future Forward Party (FFP) atau partai pro-demokrasi dalam menanggapi hukum *Lèse Majesté* di Thailand.

Secara konseptual gerakan sosial adalah suatu jenis tindakan kooperatif yang berusaha menata kembali masyarakat secara rapi dan teratur serta secara cair dan informal. Menurut Sydney Tarrow, gerakan sosial adalah tantangan kolektif yang didirikan di atas tujuan bersama solidaritas sosial (Tarrow, 1998). Dalam pembahasan gerakan sosial, beberapa ahli teori sosial mengajukan definisi gerakan sosial berdasarkan interaksi sosial yang berlangsung antara elit dan otoritas yang bersaing.

Karena cakupannya yang luas, salah satu contohnya adalah definisi gerakan sosial dari Anthony Giddens, yang menyatakan bahwa gerakan sosial adalah upaya kolektif untuk mengejar kepentingan bersama atau gerakan untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif di luar ruang lingkup dari lembaga yang didirikan (Giddens, 1987). Dapat dilihat bahwa definisi Giddens tentang gerakan sosial, yang menunjukkan bahwa gerakan sosial adalah kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama oleh kelompok, atau dengan kata lain, gerakan sosial adalah upaya kolektif untuk tercapainya tujuan yang diinginkan.

Menurut Macionis, gerakan sosial adalah kegiatan terorganisir yang bertujuan mempromosikan atau mencegah perubahan sosial. Menurut definisi Macionis tentang gerakan sosial, ada dua ciri penting dari gerakan sosial: adanya

tindakan yang terorganisir dan adanya tujuan yang terkait dengan perubahan sosial (Macionis, 1999).

Sementara itu, Locher mengklaim bahwa gerakan sosial terbentuk ketika sekelompok orang bersatu untuk mendukung atau menentang reformasi sosial tertentu. Orang-orang dengan sedikit atau tanpa kekuatan politik bersatu untuk mendapatkan atau memperjuangkan tujuan tertentu, seperti perubahan sosial, dan inilah yang dimaksud dengan gerakan sosial. Kebanyakan ahli teori perilaku kolektif, menurut Locher, melihat gerakan sosial sebagai bagian dari perilaku kolektif, sedangkan banyak ahli teori gerakan sosial melihat gerakan sosial sebagai fenomena yang berbeda (Locher, 2002).

## METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Dalam studi literatur, berbagai artikel yang berkaitan dengan topik yang diteliti akan dikumpulkan dalam bentuk buku, surat kabar, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan. Studi pustaka juga merupakan kegiatan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca, dan mencatat sampai pada tahap pengelolaan bahan penelitian. Dengan demikian, berbagai artikel yang berkaitan dengan penelitian ini akan dibaca sesuai dengan konteks studi kasus gerakan Future Forward Party (FFP) dalam menanggapi hukum *Lèse-Majesté*. Data yang diperoleh berdasarkan literatur ilmiah merupakan bagian dari data sekunder. Selain itu, ada juga informasi yang diperoleh dari media online sebagai data pendukung. Setelah data terkumpul, selanjutnya akan dianalisis berdasarkan kerangka teori yang digunakan (Zed, 2004).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hukum *Lèse-majesté*

Sejak awal, perjalanan Thailand ke periode negara-negara tampaknya terlihat seperti negara-negara lain yang telah menyelamatkan pekerjaan bagi pemerintah. Hampir tersamakan setelah kekalahannya pada tahun 1932, pemerintah Thailand, dengan bantuan para dermawan militer di akhir tahun 1950-an, siap untuk menjalani pembaruan, namun penguasa sendiri memiliki pilihan untuk muncul sebagai penghibur yang mungkin paling menderita di dalam masalah legislatif Thailand. Negara Thailand telah secara serius memajukan dasar pemerintahan

dan menggunakan tuduhan *Lèse-Majesté* untuk membekap para pencari kesalahannya, meskipun mengembangkan bantuan untuk standar aturan mayoritas, ekonomi yang berkembang, dan 'desakralisasi' atau hilangnya kesakralan masyarakat secara umum dalam banyak hal yang berbeda. Alih-alih menghilang secara bertahap, pemerintah Thailand telah ditempatkan pada titik fokus karakter publik Thailand dan dibuat jauh lebih sakral melalui penggunaan hukum *Lèse-Majesté*. Penyebab keadaan di Thailand menjadi sangat luar biasa adalah bahwa negara secara paksa menerapkan resolusi *Lèse-Majesté*, yang terletak di dalam undang-undang keselamatan publik Thailand, untuk melindungi organisasi pemerintah yang bertentangan dengan individu penguasa (Streckfuss, 1995).

Pemerintah Thailand tampaknya lebih kuat karena undang-undang *Lèse-Majesté* yang begitu ekstrim namun juga tidak terpusat karena menjadi objek pemanfaatan massal dan di dalam masyarakat umum yang seolah-olah mendukung diskusi publik. Sampai akhir-akhir ini, bagian dari penguasa telah ditangani dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan ini, dan pertanyaan-pertanyaan ini telah muncul dalam pembicaraan yang sah tentang hukum *Lèse-Majesté* itu sendiri, yang bertentangan dengan pembentukan pemerintahan (Streckfuss, 1995).

Hukum *Lèse-Majesté* sebagai semacam dakwaan keamanan publik, membuat tekanan bahwa dakwaannya pada saat itu mengungkap kewajiban negara untuk memastikan kesucian karakter publik yang sakral dan kebutuhan negara untuk melegitimasi penyembunyian kepada publik. Sejalan dengan itu, gagasan menyimpang tentang dakwaan keselamatan publik membuat ketidakserasian yang secara ganda mengungkap kekurangan dari perkembangan karakter publik negara dan meminta penyembunyian lebih lanjut. Penyelidikan hukum Thailand tentang *Lèse-Majesté* sangat ideal untuk memeriksa bentuk-bentuk kesalahan yang menyimpang. Penguasa Thailand adalah puncak sakral dari alam yang muncul dari berbagai sudut pandang untuk menghargai kesesuaian dengan leluhurnya yang tercatat. Bagaimanapun, organisasi konvensional ini dijamin oleh negara-negara maju dan undang-undang yang terletak di dalam pelanggaran terhadap keamanan publik negara. Tepatnya mengingat fakta bahwa sejumlah besar fondasi otentiknya tampaknya telah bertahan dalam kerangka waktu perintis, Thailand mungkin

menyajikan model yang lebih jelas daripada yang lain, yang tampaknya lebih mutakhir, kondisi jalan menuju perubahan ikonografi adat yang dihidupkan kembali menjadi politik yang intens (Streckfuss, 1995).

Hukum *Lèse-Majesté* penting untuk perundang-undangan Thailand yang diharapkan dapat menjamin hak atau reputasi Raja, Ratu, kerabat atau Wali Raja (Bangkok, 2020). Undang-undang ini diharapkan tidak mengontrol hak dan kesempatan penilaian atau kesempatan keilmuan, termasuk sindiran terhadap pemerintah sebagai yayasan. Pada tahun 2005, Raja Bhumibol Adulyadej (Raja Rama IX) dalam pidato ulang tahunnya mengomunikasikan ketidaknyamanan dan ketidakpuasannya sehubungan dengan hukum dengan mengatakan bahwa raja tidak dapat disalahkan dalam keadaan apapun. Meskipun demikian, Raja tidak dalam situasi untuk memiliki opsi untuk mengubah UU yang merupakan kewenangan parlemen. Sejujurnya, hukum dipandang sebagai cerminan bahwa masyarakat Thailand tidak tahan terhadap siapa pun yang mengecam Rajanya (Bangkok, 2020).

Meskipun Thailand telah menandatangani sejumlah perjanjian hak asasi manusia internasional, itu mengancam untuk melemahkan prinsip-prinsip HAM yang digariskan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (1948) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tentang Hak Sipil dan Politik (1976). Menurut Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tentang Hak Sipil dan Politik, Thailand setuju untuk melindungi hak atas kebebasan berbicara antara lain (Yu, 2013):

- a) Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berbicara;
- b) Setiap orang harus menikmati hak atas kebebasan berbicara, yang kemudian mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan mengirimkan semua jenis informasi dan gagasan, tanpa memandang batas negara, baik lisan, tulisan, atau cetakan, dalam bentuk seni atau melalui media lain.

Meskipun hak atas kebebasan berbicara dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tentang hak sipil dan politik telah dirancang sebelum munculnya internet, hak tersebut juga telah diperluas untuk mencakup segala sarana komunikasi melalui internet.

Resolusi tahunan Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang kebebasan berbicara

telah berulang-ulang menyebutkan pentingnya kebebasan berbicara di internet. Meskipun kebebasan berbicara sama sekali tidak mutlak, Pasal 19(3) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tentang Hak Sipil dan Politik menguraikan syarat-syarat ketat di mana pembatasan kebebasan berbicara dapat diterima antara lain (Yu, 2013):

- a. Melanggar hak atau reputasi orang lain;
- b. Perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum terancam.

Undang-undang monarki ofensif Thailand telah mengangkat beberapa masalah hak asasi manusia yang mengkhawatirkan. Pertama adalah menyinggung raja tanpa niat kriminal. Dalam kebanyakan kasus *Lèse-Majesté*, tersangka pelaku dapat dibawa ke pengadilan atau ditangkap hanya karena orang lain menafsirkan pernyataan ini sebagai tindakan yang merugikan monarki. Ini akan terjadi jika mengambil pernyataan terdakwa di luar konteks; terdakwa tidak mengetahui maksud dari ucapannya; atau pernyataan itu tidak secara eksplisit menyebutkan monarki Thailand (Yu, 2013).

Dengan kata lain, otentisitas atau keakuratan di balik gugatan sudah tidak relevan lagi. Tanpa memverifikasi tuduhan ini, hampir semua orang dapat mengajukan keluhan yang menyinggung raja, dan tuduhan apapun dapat memiliki banyak penjelasan. Ketidakmampuan untuk mendapatkan bentuk keadilan lain di luar keluarga kerajaan Thailand juga membawa masalah tambahan. Penuntut tidak perlu memberikan bukti apa pun untuk membuktikan bahwa terdakwa bermaksud untuk merugikan monarki Thailand, dan keputusan akhir dalam kasus *Lèse-Majesté* tergantung pada bagaimana reputasi Raja Bhumibol (Yu, 2013).

Penindasan luas kebebasan berbicara di dunia maya memberikan kesempatan untuk menekan kritik oposisi, tetapi juga dapat merusak kredibilitas undang-undang monarki ofensif Thailand. Pada masa pergolakan politik, perantara ISP dan situs web yang berisi konten online yang sensitif secara politik sering dianggap sebagai ancaman potensial terhadap keamanan nasional dan ketertiban sosial. Organisasi hak asasi manusia internasional, termasuk Amnesty International, telah mengkritik pemerintah Thailand karena mendefinisikan pelanggaran terhadap Undang-Undang Monarki sebagai masalah keamanan nasional untuk membenarkan penindasan kebebasan berbicara warga negara Thailand. Setelah pecahnya kudeta militer pada tahun 2006, militer mengeluarkan

perintah sesuai dengan darurat militer untuk melarang dan menghancurkan segala bentuk informasi yang disebarkan melalui jaringan komunikasi, dan informasi ini dianggap sebagai ancaman bagi reformasi politik. Selama periode ini, Thailand melaporkan peningkatan 33 kasus pelanggaran raja pada 2005, mencapai 478 menjerat pada 2010 hingga tujuh tahun penjara dan denda 5.000 baht, dan hingga 15 tahun penjara dalam sepuluh tahun terakhir (Yu, 2013).

## **B. Gerakan Pro-Demokrasi di Thailand**

Thailand dalam hal ini memiliki sejarah panjang mengenai kerusuhan dan protes politik, tetapi gelombang baru yang dimulai pada bulan Februari, setelah partai politik oposisi yang populer diperintahkan untuk bubar. Pemerintah itu muncul setelah pemilihan Maret lalu, dimana ini hal pertama sejak militer mengambil alih kekuasaan pada tahun 2014 (Kongres Advokat Indonesia, 2020). Bagi banyak pemilih muda dan pemula, hal ini adalah peluang untuk perubahan di kemudian hari. Namun, rezim militer telah mengambil beberapa langkah untuk memperkuat peran politiknya, dan dalam pemilihan tersebut Prayuth Chan Ocha, yang merupakan pemimpin militer sekaligus pelopor kudeta, terpilih kembali sebagai perdana menteri (Kongres Advokat Indonesia, 2020).

*Future Forward Party* (FFP) yang merupakan sebuah partai pro-demokrasi, dengan pemimpin karismatik Thanathorn Juangroongruangkit, telah memenangkan jumlah kursi terbesar ketiga dan ia sangat populer di kalangan pemilih pemula. Namun, pada bulan Februari, pengadilan memberi putusan bahwa penerimaan kredit dari Thanathorn oleh FFP dianggap sebagai sumbangan, dibuat ilegal dan pesta tersebut terpaksa harus dibubarkan. Ribuan orang kemudian bergabung dalam pawai melalui jalan-jalan. Namun, tindakan ini kemudian terpaksa berhenti karena adanya pandemi Covid-19. Pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam hukuman dua tahun penjara. Kemudian, *Future Forward Party* (FFP) memanas lagi pada bulan Juni saat salah seorang aktivis terkenal menghilang (Kongres Advokat Indonesia, 2020).

Menyusul hal tersebut, tongkat estafet disrupsi diambil alih oleh mahasiswa di seluruh Thailand. Dimulai pada 22 Februari di universitas Thammasat, Chiang Mai, dan Naresuan, protes kampus menyebar ke universitas, perguruan tinggi, dan sekolah menengah bergengsi di Bangkok dan di seluruh negeri. Selama tiga minggu berikutnya,

delapan puluh enam *flash mob* dipentaskan (BBC, 2020). Meskipun awalnya, isu pembubaran *Future Forward* adalah salah satu yang ditandai oleh para pemrotes, namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak keluhan dan tuntutan lainnya. Demonstrasi kampus yang terbentuk secara spontan dan tidak memiliki pemimpin yang jelas, mengambil bahan dari postingan media sosial di *Twitter* dan situs lainnya. Dengan menantang junta dan *status quo*, *Future Forward* telah membantu memobilisasi dan menyatukan generasi baru pemilih yang terlibat secara politik (BBC, n.d.).

Kemampuan untuk terus menggalang massa selama protes besar-besaran yang telah berlangsung beberapa bulan terakhir terganggu setelah adanya tindakan keras terhadap pertemuan publik, terutama pada beberapa aktivis terkemuka yang diadakan di luar Bangkok. Namun, setidaknya terdapat satu pemimpin mahasiswa telah berjanji bahwa protes akan terus berlanjut. Dalam beberapa bulan terakhir, “flashmob” skala kecil yang mudah diatur dan dibongkar dengan cepat telah berkampanye di kota-kota kecil, didukung oleh media sosial (Kongres Advokat Indonesia, 2020). *Flash mob* yang tampaknya spontan ini dikaitkan dengan tagar tertentu. Para pemrotes mahasiswa dibawah *Future Forward* memprotes berbagai tema hak asasi manusia dan demokrasi termasuk menyerukan pengunduran diri perdana menteri. Motif anti-monarki terlihat dari tahap awal *flash mob*, dengan cerdas dimasukkan dalam pesan tersembunyi dan gambar kartun. Tidak ada tokoh terkemuka atau aktivis politik yang lebih tua muncul di salah satu protes (BBC, 2020).

Sebaliknya, wajah-wajah muda baru muncul di panggung improvisasi. Lagu dinyanyikan, puisi dibacakan, lilin dinyalakan, dan telepon genggam dinyalakan. Demonstrasi penuh kreativitas, menampilkan pidato politik tetapi juga rutinitas tari, nyanyian kelompok, nyanyian, pemakaman pura-pura, dan pertunjukan dadakan lainnya. Sebagian besar kegiatan terinspirasi dari lokal yakni setiap kampus memiliki identitas lokal dan tagar sendiri. Pemerintah berusaha memadamkan api protes dengan mengancam mahasiswa dengan tindakan hukum. Pada 25 Maret 2020, pihak berwenang memiliki alasan yang tepat untuk menekan demonstrasi ketika keputusan darurat dikeluarkan untuk menekan penyebaran Covid-19 meskipun sebenarnya, flash mob sudah mereda setelah 14 Maret 2020 (Kongres Advokat Indonesia, 2020).

Tetapi pada akhir April, para mahasiswa

telah memulai kampanye online dengan tagar #MobFromHome, mendesak pemerintah dan Senat yang ditunjuk untuk mengundurkan diri. Pihak berwenang tidak dapat mengatasi mobilisasi cepat protes melalui media sosial dengan kreativitas dan energi para mahasiswa yang semakin bersemangat. Pemerintah berjuang untuk menanggapi tetapi terbelah antara mengabaikan para pemrotes sebagai “anak-anak” dan khawatir bahwa mereka berpotensi menjadi masalah serius. Meskipun pada awalnya kata sandi yang digunakan oleh siswa *flash-mobbing* membingungkan bagi kebanyakan orang dewasa, tak lama kemudian pihak berwenang menyadari bahwa para pemrotes mengkritik monarki dan mulai mengisyaratkan bahwa mereka mungkin dapat didakwa di bawah undang-undang *Lèse-Majesté* yang kejam di Thailand (BBC, 2020).

Para pengunjuk rasa pro-demokrasi Thailand dibawah *Future Forward* ini sekali lagi turun ke jalan-jalan di Bangkok untuk menuntut reformasi kerajaan. Pengunjuk rasa juga menaiki sebuah monumen besar di Bangkok dan kemudian membungkusnya dengan kain merah sebagai kecaman terhadap kerajaan. Dikeluarkannya gerakan melawan Perdana Menteri Prayut Chan Ocha yang membahas reformasi pemerintahan, yang sebelumnya dipimpin oleh kaum muda, sempat terhenti selama beberapa bulan akibat adanya gelombang baru Covid-19 di Thailand. Namun, melihat empat pemimpin terkemuka baru-baru ini kembali memicu protes, yang kemudian mendorong ratusan orang untuk bergabung dalam protes di perempatan Monumen Demokrasi Bangkok di bawah pengawasan ketat puluhan orang polisi anti huru hara atas dakwaan di bawah hukum *Lèse-Majesté* yang dijatuhi hukuman 15 tahun penjara jika terbukti bersalah (Bosnia, n.d.).

Kemudian, terdapat gerakan pro-demokrasi yang dimulai pada Juli 2020 guna untuk mereformasi monarki yang tidak dapat dipatahkan. Selain itu, gerakan ini melanggar UU pelanggaran nama baik kerajaan sebagai salah satu alasan utama (Bosnia, n.d.). Aksi demonstrasi ini menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Thailand. Langkah itu didorong oleh larangan junta terhadap kelompok-kelompok sosial utama, yang mengarah pada seruan untuk reformasi monarki dan pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-ocha. Para pengunjuk rasa juga percaya bahwa pemilihan 2019 dicurangi untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Protes ini bertujuan untuk mengakhiri kekuasaan pemerintah

dan mengurangi kekuasaan raja. Gerakan pro-demokrasi yang dipimpin pemuda juga ingin mengakhiri kekerasan puluhan tahun antara pendukung pemerintah militer Prayut Chan-o-cha dan penentanginya (Hidriyah, 2020).

Seperti yang diketahui, tentara Thailand memposisikan dirinya sebagai satu-satunya pelindung raja, sedangkan Raja Maha Vajiralongkorn sendiri menghabiskan sebagian besar waktunya di Jerman dan memiliki kekuasaan dalam beberapa aspek kehidupan kerajaan Thailand. Situasi ini dipandang oleh sebagian pendukung demokrasi Thailand, khususnya kaum muda, sebagai hal yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan tuntutan demokrasi yang ingin mereka kembangkan, sehingga memunculkan gerakan reformasi rezim militer yang sebelumnya tabu (Hidriyah, 2020).

Kekuasaan raja di Thailand sebenarnya cukup luas di bawah *Lèse-Majesté*, yang melarang menghina monarki, menjadikannya salah satu hukum paling ketat di dunia. Siapa pun yang melanggar aturan ini menghadapi hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, aturan hukum digunakan oleh rezim yang berkuasa untuk menekan kebebasan berekspresi. Setelah kematian Raja Bhumibol Adulyadej pada tahun 2016, sebuah gerakan untuk mereformasi monarki muncul di masyarakat, terutama di kalangan anak muda, yang berusaha mengendalikan kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn. Aktivis demokrasi menyerukan kerajaan untuk beradaptasi dengan zaman modern, menyerukan pencabutan undang-undang noda kerajaan untuk melindungi raja dari kritik, dan mendesak raja untuk menjauh dari embel-embel politik (Hidriyah, 2020).

Gerakan pro-demokrasi *Future Forward* terus berlanjut, dan semakin banyak anak muda yang ambil bagian. Bahkan, protes tersebut dilihat oleh banyak anak muda dan pemilih baru sebagai peluang untuk perubahan setelah pemerintah Thailand berada di tangan militer selama bertahun-tahun dan secara teratur mengambil tindakan politik untuk memperkuat posisinya (BBC, n.d.).

Pandemi tampaknya tidak menghalangi siapa pun untuk menunjukkan perbaikan yang diperlukan. Protes di seluruh dunia yang mengkritik pemerintah yang dianggap otoriter dan tidak demokratis selama pandemi ini tampaknya mendorong beberapa warga Thailand untuk memperjuangkan kewarganegaraan mereka. Protes yang merupakan salah satu rangkaian gerakan demokrasi yang bertujuan menggulingkan Perdana

Menteri Prayut Chan Ocha dan melemahkan kekuasaan raja, dilihat oleh para pemimpin pemuda sebagai upaya untuk membawa perubahan di Thailand demi demokrasi dan kebaikan bersama (Hidriyah, 2020).

## SIMPULAN

Kebebasan untuk berpendapat serta berekspresi merupakan hak fundamental yang memiliki dimensi personal dan sosial. Mereka dianggap sebagai kondisi yang sangat diperlukan untuk perkembangan manusia secara menyeluruh, sangat diperlukan untuk setiap masyarakat dan dasar dari setiap masyarakat yang bebas dan demokratis. Belakangan ini, suasana politik Bangkok, Thailand ramai diperbincangkan dan menjadi sorotan banyak media internasional. Beberapa kegiatan yang disorot termasuk warga negara Thailand yang telah mengorganisir protes skala besar. Thailand memiliki hukum yang disebut hukum *Lèse-Majesté*, yang melindungi raja dan melarang segala bentuk penghinaan terhadap monarki.

Ketentuan hukum *Lèse-Majesté* ini digunakan oleh rezim yang berkuasa untuk mengontrol kebebasan berekspresi. Penindasan luas terhadap kebebasan berbicara secara *online* memberikan kesempatan untuk mengekang kritik terhadap oposisi, tetapi juga dapat merusak kredibilitas undang-undang monarki otoriter Thailand. Gerakan pro-demokrasi *Future Forward Party* (FFP) muncul untuk menentang hukum *Lèse-Majesté* ini. Gerakan ini terus berlanjut, dan satu hal yang menonjol dari protes adalah meningkatnya jumlah anak muda yang bergabung. Bagi banyak anak muda dan pemilih pemula, protes dipandang sebagai peluang untuk perubahan setelah pemerintah Thailand berada di tangan militer selama bertahun-tahun dan sering mengambil langkah untuk memperkuat posisi politiknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bangkok, K. B. R. I. (2020). *Selayang Pandang Hubungan Bilateral Indonesia & Thailand*. 68–70
- BBC. (n.d.). *Demonstrasi Thailand: Mengapa kaum muda memimpin aksi besar-besaran dan bersedia melawan hukum?* BBC Indonesia. Retrieved January 2, 2022, from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54566339>
- BBC. (2020). *flashmob mahasiswa Percikan api dalam wajan atau api yang mengamuk*. BBC. <https://www.bbc.com/thai/thailand-51640629>



- Bosnia, T. (n.d.). *Politik Thailand Panas, Para Demonstran Mulai Serang Kerajaan*. CNBC Indonesia. Retrieved January 2, 2022, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210214074122-4-223154/politik-thailand-panas-para-demonstran-mulai-serang-kerajaan>
- Giddens, A. (1987). *Social Theory and Modern Sociology*. Stanford University Press.
- Hidriyah, S. (2020). *Demonstrasi pro-demokrasi di thailand*. 8–12.
- Howie, E. (2018). Protecting the human right to freedom of expression in international law. *International Journal of Speech-Language Pathology*, 0(0), 1–4. <https://doi.org/10.1080/17549507.2018.1392612>
- Kongres Advokat Indonesia. (2020). *Demonstrasi Thailand: Mengapa kaum muda memimpin aksi besar-besaran*. <https://www.kai.or.id/berita/17956/demonstrasi-thailand-mengapa-kaum-muda-memimpin-aksi-besar-besaran.html>
- Locher, D. A. (2002). *Collective Behavior*. New Jersey: Prentice Hall.
- Macionis, J. J. (1999). *Sociology*. New Jersey: Prentice Hall.
- Nudelman, L. (2018). “Beyond Common Sense :” *the Resurgence of Thailand’s Anachronistic Le` se Majeste` Law*.
- Preechasilpakul, S., & Streckfuss, D. (2008). Ramification and Re-Sacralization of the Lese Majesty Law in Thailand. *Chiang Mai University Department of History University of Wisconsin-Madison*.
- Saju, P. S. Bin. (n.d.). *Lese Majeste, “Pasal Pelindung” Keluarga Kerajaan Thailand*. Retrieved March 26, 2022, from <http://www.umm.ac.id/ar/international/lese-majeste-pasal-pelindung-keluarga-kerajaan-thailand.html>
- Shader, M., Wicaksana, D. A., Wahyudin, A., Yudha, R., & Rahmawati, M. (2021). *Penelitian Situasi Kebebasan Pers & Keselamatan Jurnalis dan Pemenuhan Hak-Hak Ketenagakerjaan Selama Masa Pandemi*.
- Sombatpoonsiri, J. (2018). *Growing Cyber Activism in Thailand. August 2017*.
- Streckfuss, D. (1995). Kings in the Age of Nations: The Paradox of Lèse-Majesté as Political Crime in Thailand. *Comparative Studies in Society and History*, 37(3), 445–475. <https://doi.org/10.1017/S0010417500019769>
- Tarrow, S. G. (1998). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Winichakul, T. (2019). *Confessions to Lese Majesty : A Lens into the Rule of Law in Thailand*. 112, 1–20.
- Yu, T. (2013). *Thailand’s Struggle for Freedom of Expression in Cyberspace*. 1–20.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.